

**FAKTOR DAN DAMPAK PERNIKAHAN DINI DI
DESA SUKOREJO KECAMATAN SAMBIREJO
KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2009/2010**

Skripsi

Untuk memenuhi sebagai persyaratan

Guna mencapai derajat Sarjana S-1

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan



Disusun oleh:

ARIS KURNIAWAN

A220 060 026

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2010**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sudah menjadi kodrat alam, bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin berbeda mempunyai daya saling menarik satu sama lain untuk hidup bersama. Hubungan antara laki-laki dengan perempuan ini dengan maksud mengadakan hubungan perkawinan. Perkawinan adalah lepas dari pengertian hidup bersama dalam arti sudah tidak menjadi tanggung jawab orang tua yang melahirkannya, dipandang dari ilmu hayat (biologis). Pernikahan dini adalah sebuah nama yang lahir dari komitmen moral dan keilmuan yang sangat kuat sebagai suatu alternatif ketika fitnah syahwat tak terkendali dan ketia seks pra nikah merajalela, terutama yang dilakukan kaum muda yang masih duduk dibangku sekolah atau pun sudah kuliah. (Pratiwi, 2004: 132)

Hal ini sebagai akibat lemahnya keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga mudah terjerumus dalam hal-hal/tindakan-tindakan yang menyimpang dari nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dimasyarakat, seperti melakukan seks bebas yang jika tidak hati-hati bisa berakibat fatal yaitu kehamilan pra nikah sehingga memaksa para pelakunya untuk melakukan pernikahan pada usia yang masih muda.

Menurut Achmad Ichsan (1986: 42) “Undang-undang perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya, untuk dapat

melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian”, untuk itu harus dicegah perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur. Menurut Hukum Perkawinan Islam dalam hal ini masyarakat bagi wanita adalah baliqh dan berakal, sedang bagi pria seperti sabda Rasulullah S.A.W. menganjurkan para pemuda yang teah mampu untuk menyegerakan nikah, dalam hal ini yaitu mampu secara ekonomi dan seksual.

Perkawinan pada dasarnya mempunyai dasar dan tujuan yang luhur dan terarah. Perkawinan merupakan dasar mula terbentuknya keluarga. Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 1 dan pasal 7 ayat 1 tentang persyaratan perkawinan di Indonesia. Adapun isi dari Undang-Undang No 1 dikatakan

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan perkawinan adalah membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tujuan mendirikan rumah tangga yang bahagia dan harmonis sering tidak seperti yang diharapkan kandas ditengah jalan. Kegagalan ini barangkali disebabkan oleh pemangku tanggung jawab yang belum dewasa, baik secara mental maupun fisik.

Dalam kaitan ini pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dijelaskan bahwa:

“Batas umur terendah untuk menikah 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita, tetapi sebenarnya pada usia tersebut belum dapat berdiri sendiri dan masih memerlukan ijin dari orang tua Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat 2 menyatakan bahwa “Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat ijin dari kedua orang tua”.

Undang-Undang No. 1 pasal 7 ayat 1 tersebut merupakan aturan yang mendorong pendewasaan terhadap usia perkawinan terutama bagi perkawinan-perkawinan dibawah umur atau pernikahan dini yang sering dilakukan di pedesaan. Tetapi peraturan inipun secara tidak langsung menjadi “alat pembenar” untuk dilaksanakan kebiasaan perkawinan di usia muda atau sering disebut pernikahan dini. Karena masyarakat bisa dengan mudah memanipulasi umur (memalsukan umur) agar bisa melangsungkan pernikahan.

Tetapi alangkah lebih bijak jika pelaksanaan pernikahan tersebut tidak melanggar aturan atau kaidah yang berlaku karena pada dasarnya menikah itu adalah hak setiap orang sebagai Warga Negara Indonesia sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada bab XA tentang Hak Asasi Manusia tepatnya pada pasal 28 B ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan lewat perkawinan yang sah”.

Perkawinan yang sah adalah yang memenuhi semua syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Tetapi tidak sedikit kita jumpai adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab agar bisa melangsungkan perkawinan. Pelanggaran yang sering dilakukan adalah menuakan umur, hal ini dilakukan agar pihak yang berkepentingan dapat melaksanakan niat mereka melangsungkan perkawinan. Sehingga tidak mengherankan jika masih banyak ditemui adanya praktek diusia muda/dini di masyarakat pedesaan.

Perkawinan pada usia muda/dini bagaimanapun juga akan menghadapi berbagai persoalan didalamnya. Persoalan-persoalan seperti itu mungkin tidak mereka sadari sebelumnya. Hal ini disebabkan daya nalar mereka yang belum kearah itu, karena salah satu faktor penyebab timbulnya persoalan-persoalan itu adalah kepribadian yang belum matang. Dengan kepribadian yang belum matang itu maka mereka tidak siap untuk menerima tanggung jawab baik sebagai suami maupun istri, belum siap menghadapi permasalahan keluarga, baik permasalahan berhubungan suami istri maupun permasalahan ekonomi keluarga yang mana akan berpengaruh terhadap perkembangan anaknya.

Undang-Undang perkawinan sudah mengatur mengenai batas usia perkawinan, tetapi ternyata pedesaan masih banyak dijumpai perkawinan di usia muda/dini. Dan pada umumnya itu menjadi masalah bagi petugas pencatat nikah. Atas dasar itulah maka peneliti merasa tertarik dengan judul: “Faktor Dan Dampak Pernikahan Dini Di Desa Sukorejo Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen Tahun 2009/2010”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini di Desa Sukorejo Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen.
2. Akibat dari pernikahan dini di Desa Sukorejo Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen.

C. Pembatasan dan Fokus Masalah

Permasalahan yang terkait dalam judul diatas sangat luas, sehingga tidak mungkin terjangkau dan terselesaikan. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya kesalahpahaman dan penafsiran yang berbeda-beda berkaitan dengan judul diatas, maka perlu adanya pembatasan dan fokus masalah, sehingga persoalan yang akan diteliti menjadi jelas dan terhindar dari kesalahpahaman. Dalam hal ini dibatasi ruang lingkup dan fokus masalah adalah sebagai berikut:

1. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah aspek-aspek dari subjek yang menjadi sasaran penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi objek adalah Faktor Dan Dampak Pernikahan Dini Di Desa Sukorejo Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen Tahun 2009/2010.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah warga masyarakat Desa Sukorejo, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan:

1. Apakah faktor-faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini di Desa Sukorejo, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen Tahun 2010?

2. Bagaimana dampak dari terjadinya pernikahan dini di Desa Sukorejo, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen Tahun 2010?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari perumusan masalah diatas, maka tujuan ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini di Desa Sukorejo, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen Tahun 2010.
2. Untuk mengetahui dampak dari terjadinya pernikahan dini di Desa Sukorejo, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen Tahun 2010.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kegunaan dalam pengembangan ilmu pengetahuan sosial umumnya dibidang ilmu kewarganegaraan yang berkaitan dengan masalah perkawinan yang merupakan Hak Asasi Manusia yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang. Sebagai kajian sebuah aturan dan tindakan yaitu UU No.1 Tahun 1974 didukung oleh aturan dalam agama dan masyarakat (adat) / hukum perdata.
- b. Memberikan dasar-dasar dan landasan bagi peneliti mengenai pernikahan dini. Agar supaya tentang penelitian ini dijadikan sebuah momentum dalam masyarakat dan semestinya pembendungan bagi yang lain.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian dimaksudkan untuk memberi masukan kepada masyarakat di Desa Sukorejo, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, tentang segala sebab dan akibat dari pernikahan dini dan terlaksanakannya pernikahan di desa sukorejo.
- b. Memberikan masukan pada pihak lain yang berkepentingan yang ingin mengadakan penelitian sejenis. Agar supaya sebagai landasan untuk berpijak dan akan lebih memudahkan pada hukum agama dan pemerintah.